

Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

Bella Artha Ningsih, Harsi Romli & Andini Utari Putri

Universitas Indo Global Mandiri

Email : bellaartha48@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the contribution of motorized vehicle name transfer fees and motor vehicle taxes to the regional revenue of South Sumatra Province in 2016-2019. The data used in this study is the report on the realization of the transfer of motor vehicle name transfer, motor vehicle tax, and local revenue from South Sumatra Province in 2016-2019. This research method uses a quantitative approach using multiple linear regression as a measuring tool to test the hypothesis. The results showed that the variable of motorized vehicle name transfer fee, motor vehicle tax had a positive effect on the variable of local revenue in South Sumatra Province.

Keywords: contribution, the transfer fee for motor vehicle names, motor vehicle tax, local revenue

1. Pendahuluan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari APBN dan pinjaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung penerimaan pajak ikut meningkat. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2019?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang ditetapkan dan juga dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak tersebut dipungut berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum.

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari, dkk, 2014:94).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014:94). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara (Dewi, 2018).

2.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tabel perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam Negeri. Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan, Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas) (Inggrini, 2018).

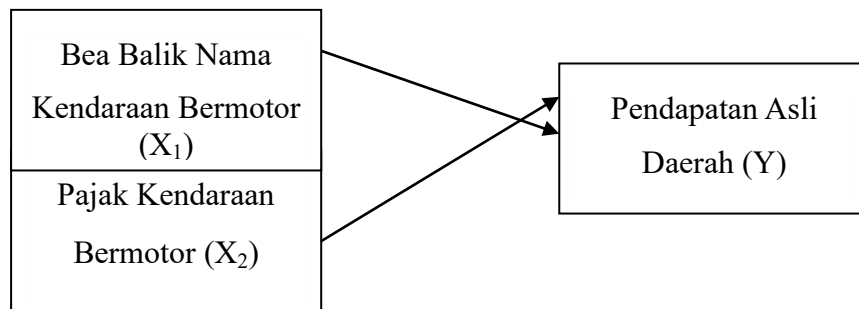
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi

merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang dihitung dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif karena menguji variabel Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3.1.1 Objek Penelitian

Penelitian ini meliputi Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu lima bulan yaitu mulai bulan April hingga bulan September 2020. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Jl. POM IX, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos : 30137.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan data realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2019 yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh item-item pajak

kendaraan bermotor yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019 Provinsi Sumatera Selatan.

Sampel adalah satu set kumpulan data penelitian yang merupakan bagian dari populasi. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah berdasarkan pada *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan sampel laporan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2019 Provinsi Sumatera Selatan.

3.4 Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kontribusi untuk mendefinisikan kontribusi. Mendefinisikan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

1. Untuk mencari Kontribusi BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

$$\text{Kontribusi BBNKB} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan BBNKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Untuk mencari Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3. Untuk mencari Kontribusi BBNKB dan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

$$\text{Kontribusi BBNKB dan PKB} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan BBNKB} + \text{Jumlah Penerimaan PKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri, Tahun 2013.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tingkat Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 1. Perhitungan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Jumlah Realisasi Kontribusi Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1.	2016	526.209.192.157,00	2.546.177.544.348,66	20,67%
2.	2017	802.473.526.615,00	3.031.633.624.303,95	26,47%
3.	2018	979.999.970.401,00	3.528.010.712.183,54	27,78%
4.	2019	929.917.321.275,00	3.494.510.853.251,62	26,61%
	Rata-Rata			25,38%

4.1.2 Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 2. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Jumlah Realisasi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1.	2016	847.081.975.441,00	2.546.177.544.348,66	33,27%
2.	2017	873.456.322.575,00	3.031.633.624.303,95	28,81%
3.	2018	902.615.235.265,00	3.528.010.712.183,54	25,58%
4.	2019	974.117.378.669,00	3.494.510.853.251,62	27,87%
	Rata-Rata			28,88%

4.1.3 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3. Perhitungan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Jumlah Realisasi Kontribusi Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah Realisasi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1.	2016	526.209.192.157	847.081.975.441	2.546.177.544.348	53,93%
2.	2017	802.473.526.615	873.456.322.575	3.031.633.624.303	55,28%
3.	2018	979.999.970.401	902.615.235.265	3.528.010.712.183	53,36%
4.	2019	929.917.321.275	974.117.378.669	3.494.510.853.251	54,49%
Rata-Rata					54,26%

4.2 Diskusi

4.2.1 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif sedang bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Selatan. Hal ini terjadi karena jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi tetapi pendapatan BBN-KB yang menyumbang terhadap PAD masih terhitung kecil. Sehingga walaupun jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBN-KB tergantung transaksi jual beli motor.

4.2.2 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif sedang pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan pada pendapatan asli daerah. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB. Penerimaan PKB tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.3 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan dari penelitian diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh positif sangat baik bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan bea

balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor lebih diperhatikan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi salah satu pokok pemasukan paling besar untuk pajak daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV sebelumnya didapatkan hasil yaitu:

1. Hasil uji secara bersama-sama diketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan berpengaruh positif sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Referensi

- Inggrini, R., Morasa, J., & Lidia Mawikere. (2018). *analisis penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di sulawesi utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 303-310 Indonesia, 13(3), 303–310.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15.<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). *pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)*. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Akuntansi, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)